

Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah (Studi Pada SKPD Kabupaten Kebumen)

Muhammad Nasrul Amali¹⁾, Eko Darmawan Suwandi²⁾

¹Universitas Putra Bangsa, Kebumen

E-mail: nasrulamali123@gmail.com

E-mail: darmawanspb@gmail.com

Abstract

This study was aimed at finding out (1) the effect of local finance supervision on Local Government performance, (2) the effect of local finance management accountability on Local Government performance, (3) the effect of local finance management transparency on Local Government performance, and (4) the effect of local finance supervision, local finance management accountability and local finance management transparency on Local Government performance.

This study was conducted in the SKPD of Kebumen Regency using a population of 52 people. The data used in the supervision sector were of qualitative types and their source was a primary source. The data were collected using questionnaire. The data were analyzed using multiple regression analysis aided by SPSS program of version 25.00.

This study was aimed at finding out (1) Regional financial supervisor has not effect on the performance of the Kebumen Regency government, (2) financial management accountability has not effect on the performance of the Kebumen Regency government, (3) the transparency of financial management has not effect on the performance of the Kebumen Regency government, (4) the local finance supervision, accountability and transparency in the finance management have a effect on the Local Government of Buleleng Regency performance.

Keywords : *Supervision, Accountability, Transparency, Performance*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingginya asumsi masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan kinerja pemerintah menjadi salah satu isu yang menjadi sorotan publik. Hal ini dikarenakan masyarakat belum merasakan kinerja pemerintah secara maksimal (Audyta *et al.*, 2013). Keberhasilan kinerja pemerintahan dapat dinilai dari pembangunan baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Masyarakat luas menilai keberhasilan pembangunan pada bidang ekonomi yang terwujud dalam pembangunan infrastruktur. Pembangunan bukan hanya berarti penekanan pada akselerasi dan keberhasilan di bidang ekonomi, namun meliputi reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktivitas ekonomi dan sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Pemerintah daerah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang sumber pengesahannya berasal dari masyarakat. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh pada masyarakat. Untuk pemerintah daerah, penilaian kinerja menjadi sorotan banyak pihak terlebih dengan adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat seperti yang diamanatkan dalam UU nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Tuntutan agar instansi pemerintah terutama bagi pemerintah daerah untuk dapat mengukur kinerja semakin besar dengan

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Suatu pengukuran kinerja manajerial yang sah dan dapat dipercaya mutlak diperlukan untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Maka pengukuran kinerja manajerial instansi pemerintah patut mendapatkan perhatian yang serius sebab berkaitan dengan tanggung jawab alokasi anggaran daerah. Agar pemerintahan yang baik tersebut menjadi kenyataan dan sukses, maka kualitas pelaksanaan kinerjanya harus ditingkatkan.

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah (pusat) dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna (Halim, 2002). Pengawasan merupakan tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan pegawai organisasi (Hasibuan, 2014).

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik sebagai perwujudan *good governance* khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah, tidak terlepas dari sistem pengawasan yang baik, bahwa dengan adanya pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh inspektorat sebagai Bawasda (Badan Pengawasan Daerah) dan mampu melaksanakan tugas pokok fungsi masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan meminimalisir penyimpangan yang terjadi. Oleh karena itu dengan adanya pengawasan pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Wiguna *et al.*, (2015).

Selain pengawasan pengelolaan keuangan, hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dengan menjalankan azas akuntabilitas pengelolaan keuangan, pemerintah diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian semakin tinggi dan akuntabel pengelolaan keuangan daerah, maka akan semakin meningkat kinerja pemerintah daerah. Auditya *et al.*, (2013), Wiguna *et al.*, (2015) Akuntabilitas finansial/keuangan adalah

pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*public money*) secara ekonomis, efektif dan efisien, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

Selain pengawasan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting diterapkan pada penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, jujur dan benar. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya untuk dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial maupun politik sehingga akan berdampak baik bagi masyarakat. Dengan begitu kinerja pemerintah dapat dikatakan baik apabila masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintah.

Transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin transparan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan maka akan semakin meningkat kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Auditya *et al.*, (2013), Wiguna *et al.*, (2015), Adiwirya dan Sudana (2015). Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pemeriksaan LKPD TA 2019 yang telah dilakukan, kabupaten kebumen berhasil mempertahankan Opini WTP. Dalam pemeriksaan atas LKPD TA 2019 pada kabupaten kebumen masih menemukan adanya kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut antara lain meliputi, pengelolaan aset tetap belum optimal, pengelolaan belanja bantuan sosial, pengelolaan kas dan piutang, pengelolaan dana BOS, pengelolaan Dana Desa dan kekurangan volume pekerjaan atas pelaksanaan belanja modal (<https://www.inikebumen.net>).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : pertama, pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja Pemerintah Daerah, kedua pengaruh akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah terhadap kinerja Pemerintah Daerah, ketiga pengaruh transparansi pengelolaan Keuangan Daerah terhadap kinerja Pemerintah Daerah,

keempat pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan Daerah terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Manfaat penelitian ini adalah Secara teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keadaan Pengawasan keuangan, Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah. kemudian manfaat praktis Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam memperbanyak pengetahuan yang berhubungan dengan pengawasan Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Kebumen. Serta dapat mengetahui seberapa besar pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD di kabupaten kebumen?
2. Apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD di kabupaten kebumen?
3. Apakah transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD di kabupaten kebumen?
4. Apakah pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara bersama sama terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD di kabupaten kebumen?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah disusun peneliti, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD kabupaten kebumen.
2. Mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD kabupaten kebumen.
3. Mengetahui pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap

kinerja pemerintah daerah pada SKPD kabupaten kebumen.

4. Mengetahui pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak lain yang meneliti dengan kajian yang sama yaitu pengawasan keuangan, akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah daerah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam memperbanyak pengetahuan yang berhubungan dengan pengawasan Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Kebumen. Serta dapat mengetahui seberapa besar pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Kebumen.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengawasan Keuangan daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011: "Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien".

Sedangkan menurut Baswir (1999:129) Pengawasan keuangan daerah merupakan bagian

integral dari pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan pengertiannya, pengawasan keuangan daerah pada dasarnya mencakup segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai rencana, ketentuan, dan undang-undang yang berlaku.

2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Menurut Adisasmita (2011:81) Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran dalam pertanggungjawaban ini yaitu berupa laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpangan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Mahmudi (2007:11) Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*public money*) secara ekonomis, efisiensi dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

2.3 Transparansi Pengelolaan Keuangan

Teori pemerintah menjelaskan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Menurut Adisasmita (2011:39) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Pemerintah (2010) Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

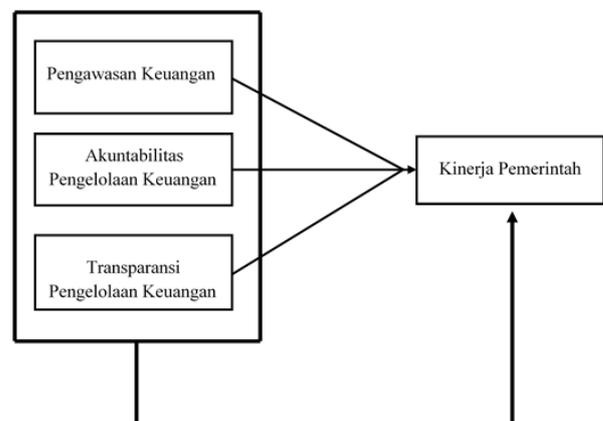
2.4 Kinerja Pemerintah Daerah

Bastian, (2010:274) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, dan kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan visi dan misi

organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi.

Sedangkan Menurut Mahsun (2012:141) Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi dan apabila anggota/karyawannya baik dan berkualitas, maka kinerja pemerintah daerah akan menjadi baik dan berkualitas juga.

Berdasarkan tujuan dan landasan teori, maka peneliti mencoba menggambarkan hubungan antara pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah dalam suatu kerangka pemikiran, seperti tampak pada gambar berikut :



H1 : Pengawasan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Kebumen

H1 : Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Kebumen

H1 : Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Kebumen

H1 : Pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Kebumen.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasinya yang ditentukan dalam penelitian ini adalah pegawai pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kab. Kebumen pada Team anggaran. Sedangkan sampel nya adalah kepala instansi, Sekertaris dan pejabat pengelolaan keuangan dari setiap SKPD. Responden ini dipilih karena mereka merupakan pihak yang mempunyai peran dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban.

3.2 Jenis dan Sumber data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi empiris dengan pendekatan penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang berupa angka dan perhitungan statistik dan data kualitatif, yaitu data yang berupa responden dan pertanyaan yang diberikan dalam bentuk kuisisioner.

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung diperoleh dari objek yang diteliti. Kuisisioner penelitian ini diserahkan langsung kepada responden atau meminta bantuan kepada salah satu pegawai untuk mengkoordinir penyebaran dan pengumpulan kuisisioner pada pegawai tersebut sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

3.3 Operasional Variabel

Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja pemerintah daerah yang dimaksud dalam penelitian adalah kemampuan pejabat/pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban di setiap SKPD dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan standard peraturan yang berlaku. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan penjelasan dari Kreitner dan Kinicki dalam Akmalia (2019) yaitu: a) kualitas kerja, b) produktivitas, c) penilaian kinerja, d) ketepatan waktuan.

Variabel Independen (X)

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

1. Pengawasan keuangan daerah (X1)
Pengawasan keuangan daerah merupakan

bagian integral dari pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan keuangan daerah pada dasarnya mencakup segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan undang-undang yang berlaku (Baswir, 1999:129). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan penjelasan dari Menurut Ranchman dalam Akmalia (2019) yaitu : a) peningkatan disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas, b) berkurangnya penyalahgunaan wewenang, c) berkurangnya kebocoran, prmborosan dan pungutan liar.

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (X2)

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk pertanggungjawaban laporan keuangan setiap SKPD di pemerintah Kabupaten Kebumen. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan penjelasan dari Mulyadi dalam Akmalia (2019) yaitu: a) motivasi, b) pengabdian dan proses, c) kewajiban sosial.

3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah (X3)

Transparansi pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi kemampuan pejabat/pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah di setiap SKPD di pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mempublikasikan dan mempertanggungjawabkan hasil laporan keuangan kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan daerah secara benar, jujur dan tidak diskriminatif. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan penjelasan dari Mardiasmo dalam Akmalia (2019) yaitu: memberikan informasi, dokumen-dokumen yang dipublikasikan, selalu tepat waktu, usulan masyarakat selalu diakomodasi, kemudahan dalam mengakses dokumen publik tentang anggaran, dan adanya sistem pemberian informasi kepada publik.

3.4 Uji instrument Variabel

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Tingkat validitas diperoleh dengan membandingkan probabilitas

nilai r dengan α -nya. Bila probabilitas $< 0,05$ maka alat ukur tersebut dikatakan valid.

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel. Teknik pengujian reliabilitas ini menggunakan teknik uji statistik *Cronbach Alpha*, hasil perhitungan menunjukkan reliabel bila koefisien α -nya (α) lebih besar dari 0,70 artinya kuisioner dapat dipercaya dan dapat digunakan (Ghozali, 2013:48).

3.5 Uji hipotesis

Untuk mengetahui pengaruh pengawasan keuangan (X_1), akuntabilitas pengelolaan keuangan (X_2) transparansi pengelolaan keuangan (X_3) terhadap kinerja pemerintah (Y) dengan menggunakan persamaan regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 - b_2X_2 - b_3X_3 + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

- Y = Kinerja Pemerintah
- XI = Pengawasan Keuangan
- X2 = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
- X3 = Transparansi Pengelolaan Keuangan
- b_1, b_2, b_3 = Koefisien
- a = Konstanta
- e = Error

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial atau sendiri-sendiri antara variabel bebas yaitu (pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas pengelolaan keuangan, transparansi pengelolaan keuangan) terhadap variabel terikat (kinerja pemerintah). Kriteria pengujian yang digunakan dengan membandingkan nilai signifikan yang diperoleh dengan taraf signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05. Setelah tingkat taraf signifikan telah ditentukan sebesar 0,05. Selanjutnya adalah membandingkan t hitung dengan t tabel dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika t hitung $> 0,05$, maka H_0 ditolak atau H_a diterima.
- b. Jika t hitung $< 0,05$, maka H_0 diterima atau H_a ditolak.

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independen) yang digunakan dalam penelitian apakah mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (dependen). Kriteria pengujian yang digunakan

dengan membandingkan nilai signifikan yang diperoleh dengan taraf signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05. Apabila nilai signifikan $< 0,05$ maka variabel independen secara bersama-sama mampu mempengaruhi variabel dependen atau hipotesis diterima. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut :

H_0 : Tidak terdapat pengaruh antara pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

H_a : Terdapat pengaruh antara pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

Selanjutnya adalah membandingkan t hitung dengan t tabel dengan sebagai berikut :

- a. Jika F hitung $> 0,05$, maka H_0 ditolak atau H_a diterima.
- b. Jika F hitung $< 0,05$, maka H_0 diterima atau H_a ditolak.

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien dari koefisien determinasi adalah 0 sampai dengan 1. Jika nilai R^2 mendekati 0 maka semakin kecil kemampuan model dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R^2 mendekati angka 1, maka semakin kuat model tersebut dalam menjelaskan variabel independen untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:97).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil penelitian

Penelitian ini menganalisis penguaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan tansparansi pengelolaan keuangan terhadap kinerja pemerintah dan objek penelitian ini adalah SKPD Kabupaten Kebumen dengan pengambilan sampel adalah individu yang melakukan pengelolaan keuangan diantaranya: Kepala Dinas, Sekertaris dan Bendahara. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuisioner secara langsung kepada responden penyebaran kuisioner dilaksanakan mulai tanggal 22 Agustus sampai 28 Agustus 2020. Data penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis data yang telah dipilih untuk mencapai tujuan penelitian. Berdasar Tabel 1

Di bawah ini terlihat bahwa kuesioner yang dikirim adalah sebanyak 60 kuesioner. Kuesioner yang kembali sejumlah 54 kuesioner atau sebesar 86 %, sedangkan kuesioner yang tidak direspon

sebanyak 4 kuesioner dan hanya 2 kuesioner yang tidak dapat digunakan. Jadi, kuesioner yang dapat digunakan adalah sejumlah 52 kuesioner atau sebesar 90%.

Tabel 1.
Deskripsi Penyebaran dan Pengembalian Kuisisioner

Keterangan	Jumlah Kuisisioner
Kuisisioner yang dikirim	60
Kuisisioner yang direspon	54
Kuisisioner yang tidak direspon	4
Kuisisioner yang tidak dapat digunakan	2
Kuisisioner yang dapat digunakan	52
Tingkat pengembalian	86%
Tingkat pengembalian yang dapat digunakan	90%

Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik ini meliputi jenis kelamin, jabatan, tingkat

pendidikan, usia, dan masa kerja. Karakteristik responden secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2.
Karakteristik Responden

No	Uraian	Fr	(%)
1	Jenis kelamin :		
	Laki-laki	20	38%
	Perempuan	32	62%
	Total	52	100%
2	Jabatan :		
	Kepala Dinas	9	17%
	Sekretaris	12	23%
	Bagian Keuangan	19	36%
	Lainya	12	23%
	Total	52	100%
3	Tingkat Pendidikan :		
	S3	4	8%
	S1	39	75%
	D3	8	15%
	SMA/K	1	2%
	Lainya	0	0%
	Total	52	100%
4	Usia		
	17-25 Tahun	4	8%
	26-35 Tahun	13	25%
	36-45 Tahun	18	34%
	> 45 Tahun	17	32%
	Total	52	100%

No	Uraian	Fr	(%)
5	Lama Bekerja :		
	< 1 Tahun	0	0%
	1-2 Tahun	5	10%
	3-5 Tahun	5	10%
	> 5 Tahun	42	80%
	Total	52	100%

Responden berdasarkan jenis kelamin dimana dari 52 orang, yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 20 orang (38%), dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 32 orang (62%).

Jabatan responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini, adalah Kepala Dinas sebanyak 9 orang (17%), Sekretaris 12 orang (23%), bagian keuangan 19 orang (36%), dan Lainnya 12 orang (23%).

karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dimana dari 52 orang, pendidikan terakhir Diploma sebanyak 8 orang (15%), berpendidikan S1 sebanyak 39 orang (75), dan berpendidikan S2 sebanyak 4 orang (8%), dan berpendidikan terakhir SLTA sederajat sebanyak 1 orang (2%).

Karakteristik responden berdasarkan usia dimana dari 52 orang responden, terdiri dari usia 17-25 tahun sebanyak 4 orang (8%), usia 26-35 tahun sebanyak 13 orang (25%), usia 36 - 45

sebanyak 18 orang (34%), sedangkan usia lebih dari > 45 tahun sebanyak 17 orang (32%).

Karakteristik responden berdasarkan masa kerja dimana dari 52 orang responden, terdiri dari lama bekerja 1-2 tahun sebanyak 5 orang atau 10%, lama bekerja 3-5 tahun sebanyak 5 orang atau 10% dan lama bekerja lebih dari 5 tahun sebanyak 42 orang atau 80%.

4.2 Hasil Pengujian Validitas dan Realibilitas

Uji Validitas pada penelitian ini terdapat jumlah sampel (n) = 52 responden dan besarnya *df* dapat dihitung menjadi $52-2 = 50$, dengan $df=50$ dan $\alpha = 0,05$ diketahui *r* tabel = 0.2306. Jadi, item pernyataan yang mempunyai *r* hitung lebih besar dari 0.2306 adalah valid. Dan Suatu instrument dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 (Ghozali,2009). Berikut tabel hasil uji reliabilitas Hasil pengujian validitas dan realibilitas dapat di lihat pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3
Uji Validitas dan Realibilitas

Item Pertanyaan	Variabel	Validitas		Realibilitas	
		Koefisien korelasi	Keterangan	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Y.1	Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	0.687	Valid	0,833	Reliabel
Y.2		0.862	Valid		
Y.3		0.899	Valid		
Y.4		0.741	Valid		
Y.5		0.688	Valid		
X1.1	Pengawasan Keuangan Daerah (X1)	0.658	Valid	0,725	Reliabel
X1.2		0.829	Valid		
X1.3		0.747	Valid		
X1.4		0.780	Valid		
X2.1	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (X2)	0.775	Valid	0,778	Reliabel
X2.2		0.657	Valid		
X2.3		0.728	Valid		
X2.4		0.814	Valid		
X2.5		0.701	Valid		

Item Pertanyaan	Variabel	Validitas		Realibilitas	
		Koefisien korelasi	Keterangan	Cronbach's Alpha	Keterangan
X3.1	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0.666	Valid	0,861	Reliabel
X3.2		0.766	Valid		
X3.3		0.760	Valid		
X3.4		0.669	Valid		
X3.5		0.678	Valid		
X3.6		0.798	Valid		
X3.7		0.788	Valid		
X3.8		0.642	Valid		

Berdasarkan dari tabel 3, dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dalam kuisisioner dinyatakan valid dan reliabel. Hal ini dijelaskan bahwa r hitung lebih besar dari r tabel dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga semua butir pertanyaan yang dipakai pada variabel Pengawasan, akuntabilitas, transparansi dan kinerja pemerintah dinyatakan valid, dan seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,7$ maka variabel tersebut reliabel.

4.3 Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil Pengujian Secara Parsial (Uji T)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi tiap variabel independent dengan melihat masing-masing tingkat signifikan yang kemudian dibandingkan dengan taraf signifikan yang telah ditentukan yaitu sebesar 5% (0,05). Hasil analisis uji t dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini :

Tabel 4
Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.	F
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	10.444	3.490		2.993	.004	
Pengawasan Keuangan Daerah	.301	.177	.256	1.704	.095	
Akuntabilitas	-.070	.182	-.065	-.382	.704	
Transparansi	.177	.108	.282	.1643	.107	
<i>Adjust R Square</i>						.127
F-Hitung						3.466
Sig. F						.023 ^b

Berdasarkan tabel diatas Variabel Pengawasan Keuangan Daerah (X1) mempunyai nilai t_{hitung} sebesar $1.704 > t_{tabel} 1.677$ dengan tingkat signifikan $0,095 > 0,05$. Hasil ini menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah mempunyai pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Variabel Akuntabilitas (X2) mempunyai nilai t_{hitung} sebesar $-0,382 < t_{tabel} 1.677$ dengan tingkat signifikan $0,704 > 0,05$. Hasil ini menyatakan

bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Variabel Transparansi (X3) mempunyai nilai t_{hitung} sebesar $1643 < 1.677$ dengan tingkat signifikan $0,107 > 0,05$. Hasil ini menyatakan bahwa transparansi mempunyai pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Hasil pengujian hipotesis secara simultan dapat dilihat pada tabel 4. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai F hitung sebesar 3.466 dengan tingkat signifikansi $0,023 < 0,05$ maka dapat disimpulkan secara bersama-sama pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Besarnya pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah dapat dilihat nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,178, hal ini berarti bahwa 17,8% yang menunjukkan kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh variabel pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

4.4 Hasil Pembahasan

Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil yang disajikan tabel menunjukkan bahwa koefisien variabel pengawasan keuangan daerah sebesar 0.301 dengan hasil uji t-test diperoleh hasil t-hitung 1.704 lebih besar dari t-tabel yaitu sebesar $1.704 > 1.677$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,095 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan hipotesis pertama ditolak artinya pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Artinya sebuah organisasi sektor publik yang memiliki tingkat pengawasan yang tinggi tidak meningkatkan pengelolaan keuangan. Hal ini disebabkan karena tingkat pengawasan yang tinggi akan menyebabkan pegawai maupun pimpinan mengalami tekanan dalam menjalankan tugasnya. Tekanan membuat seseorang bekerja tidak tenang dan santai karena selalu diawasi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Suparmo (2012) yang menyatakan bahwa sebuah organisasi sektor publik yang memiliki tingkat pengawasan yang tinggi tidak meningkatkan

pengelolaan keuangan. Hal ini disebabkan karena tingkat pengawasan yang tinggi akan menyebabkan pegawai maupun pimpinan mengalami tekanan dalam menjalankan tugasnya. Tekanan membuat seseorang bekerja tidak tenang dan santai karena selalu diawasi, sebaiknya pengawasan dilakukan sewajarnya dan sesuai peraturan yang berlaku.

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil yang disajikan tabel menunjukkan bahwa koefisien variabel pengawasan keuangan daerah sebesar -0.070 dengan hasil uji t-test diperoleh hasil t-hitung -0.382 lebih kecil dari t-tabel yaitu sebesar $-0.070 < 1.677$ dengan nilai signifikansi sebesar signifikan $0,704 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan hipotesis kedua ditolak artinya Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, dengan demikian penyebab akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah adalah karena pemerintah gagal menjalankan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik.

Dilihat juga penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Astuti (2013) tentang Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Grobogan yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak ada berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah di DPPKAD Kabupaten Grobogan dengan nilai sig sebesar 0,164, karena berada diatas nilai signifikansi yang dipersyaratkan yaitu 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas yang buruk dapat menurunkan kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan daerah Terhadap kinerja pemerintah

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil yang

disajikan tabel menunjukkan bahwa koefisien variabel transparansi keuangan daerah sebesar 0.177 dengan hasil uji t-test diperoleh hasil t-hitung lebih kecil dari t-tabel yaitu sebesar $1.643 < 1.677$ dengan nilai signifikansi sebesar signifikansi 0,107 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan hipotesis ketiga ditolak artinya transparansi pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya transparansi yang kurang baik dapat menurunkan kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitiannya Astuti (2013) yang menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi pada DPPKAD Grobogan dengan nilai signifikansi 0,266, yang berarti tidak signifikan karena berada di atas nilai signifikansi yang dipersyaratkan yaitu 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transparansi yang kurang baik dapat menurunkan kinerja pemerintah daerah pada satuan kerja perangkat daerah khususnya di DPPKAD Kabupaten Grobogan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengujian variabel pengawasan keuangan daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa variabel pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kebumen.
2. Pengujian variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kebumen.
3. Pengujian variabel Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
4. Hasil uji F (simultan) juga menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel Pengawasan keuangan daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh

signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Kebumen.

6. SARAN

Pertama hasil penelitian ini diharapkan bagi pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Kebumen agar dapat memperhatikan hal-hal yang mendukung meningkatkan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih baik seperti pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat mewujudkan pemerintahan *good governance* sebagaimana yang dicita-citakan oleh setiap pemerintahan.

Penelitian ini hanya menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuisioner, diharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk menambah teknik pengumpulan data berupa wawancara ataupun teknik lainya sehingga dapat menggali informasi yang lebih detail dan meminimalisir permasalahan subjektif dan keseriusan responden dalam menjawab pertanyaan.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adiwirya, M. F., dan Sudana, I. P. (2015). Akuntabilitas, Transparansi, Dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 11.
- Akmalia, D. 2019. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada SKPD Lhoksemawe. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Aceh
- Anshori, A. M. (2018). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bantul. *Jurnal Ekonomi Dewantara*, 68.
- Auditya, L., Husaini, & Lismawati. (2013). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan

- Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*, 3.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Baswir, R. (1999). *Akuntansi Pemerintah Indonesia Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Edisi Keempat*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS 19*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS 19 Cetakan VIII*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, Dan Iqbal. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Putra, G. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan Daerah Dan Transparansi Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. *JOM Fekon*, 4.
- Putra, N., Erlina, Dan Sari, A. T. (2016). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Pengawasan Sebagai Variabel Moderating Pada Provinsi Sumatra Utara. *Jurnal Ekonomi*, 19.
- Siagian, S. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, S. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Cetakan Ke-11*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sukarna. (2011). *Dasar Dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju
- Tjandra, R. (2013). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT Grasindo.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah Diatur Pengawasan yang Bersamaan dengan Pembinaan (2004)*, Jakarta: Republik Indonesia
- Wiguna, M. B., Yuniarta, G. A., & Darmawan, N. A. (2015). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. *e-jurnal SI Akuntansi*, 3.